

# RENJA RENCANA KERJA

# 2022

**dLh**  
Purwakarta Herang



PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-nya dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran kegiatan per tahun yang telah disusun dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Materi Penyusunan Kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di masing-masing bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, namun demikian diharapkan Program dan Kegiatan yang terkandung didalamnya dapat dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Kepada semua pihak yang telah turut berperan serta didalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami menyampaikan banyak terima kasih dan kami menyadari masih banyak kekurangan mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, kami berharap ada koreksi, kritik dan saran membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Purwakarta, Februari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**Drs. R. Deden Guntari**  
NIP. 19640228 199203 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan .....	15
1.4 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU</b> .....	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup .....	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	40
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup .....	46
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	47
2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat .....	57
<b>BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	59
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	59
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup .....	62
3.3 Program dan Kegiatan .....	65
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	76
4.1 Program dan Kegiatan .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	84

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabuapten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, yang menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah “**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**”. Dimana visi ini mempunyai makna adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Sedangkan Misi Bupati Purwakarta tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- Misi :
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Profesional;

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa;

Dari 4 (empat) Misi di atas, Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berada pada misi ke 3 (tiga ) dengan tujuan dan sasarannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
<p><b>Misi Ketiga :</b></p> <p>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatkan Pembangunan Insfrastuktur, Penaatan Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Lingkungan Hidup.</li> <li>➢ Mengembangkan Pariwsata Berwawasan Lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Inprastuktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.</li> <li>➢ Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>➢ Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.</li> </ul>

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Purwakarta periode tahun 2018 - 2023 tersebut di atas, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"**.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aparatur yang peduli, taat dan profesional;
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengawasan & mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup.

Dari ketiga Misi yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Misi 1, yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, capable dan professional akan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH yang optimal;

Misi 2, menjadikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis yang mampu dan kredibel memiliki kewenangan di daerah untuk mengelola sumber daya alam dan mengendalikan keutuhan lingkungan hidup hulu maupun hilir, fisik maupun sosial;

Misi 3, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup merupakan tupoksi dinas yang senantiasa dilakukan secara transparan dan professional serta mengikutkan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup.

Dengan mengacu kepada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut di atas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 – 2023, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dibidangnya;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan;

3. Mengembalikan kondisi sumber air, sungai & danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah dan lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Penegakkan hukum lingkungan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aparatur yang profesional & memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
3. Meningkatkan perlindungan konservasi sumber daya alam & keanekaragaman hayati;
4. Meningkatkan pengamanan sumber mata air;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
6. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan;
7. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

Berdasarkan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas , bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya terpadu untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan yang merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.



Permasalahan lingkungan hidup akhir – akhir ini menjadi salah satu isu utama di dunia. Isu GLOBAL WARMING atau pemanasan global, disinyalir menyebabkan mencairnya es di kutub dan terjadinya perubahan iklim serta hilangnya pulau – pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut. Namun inti utama penyebab GLOBAL WARMING diakibatkan adanya peningkatan emisi gas – gas rumah kaca ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{NO}_x$ , dan  $\text{SO}_x$ ) yang berasal dari kegiatan manusia.

Penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca ini berasal dari sektor perindustrian, transportasi dan limbah yang dihasilkan oleh manusia selain akibat polusi oleh alam (mis ; gunung berapi dsb).

Degradasi lingkungan memang sangat pelik dan merupakan masalah yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Terutama di Indonesia permasalahan lingkungan hidup meliputi banyak hal, dimulai dari tingginya laju peningkatan penduduk yang berimbas pada banyak nya lahan – lahan hijau yang beralih fungsi menjadi permukiman, menurunnya kualitas udara di kota – kota besar, pencemaran akibat limbah industri dan domestik, penanganan pengelolaan sampah yang tidak profesional, penurunan kualitas tanah karena pencemaran, banyaknya lahan kritis, deforestasi hutan, krisis air bersih, krisis sumber daya energi (minyak bumi, batubara dsb) yang semakin menipis, pola perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan serta banyaknya kebijakan – kebijakan baik di pusat maupun di daerah yang tidak pro terhadap lingkungan sebagai salah satu penyumbang sebagian masalah lingkungan hidup yang cukup kompleks di Indonesia.

Secara umum kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta relatif masih cukup baik, namun dalam perkembangannya pembangunan dan peningkatan penduduk yang terus bertambah menyebabkan tekanan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup cukup nyata di Purwakarta. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor utama yang memicu terjadinya perubahan lingkungan, sebagian besar penambahan penduduk di Kabupaten Purwakarta berasal dari warga pendatang yang mencari pekerjaan di Purwakarta.

Banyaknya industri menjadi daya tarik tersendiri bagi warga pendatang untuk datang ke Kabupaten Purwakarta Dampak peningkatan jumlah penduduk di Purwakarta menyebabkan lahan – lahan pertanian dan ruang terbuka hijau banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman, kemudian pertambahan jumlah sampah domestik yang dihasilkan ikut mencemari lingkungan, dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan ikut pula menambah pencemaran udara di Kabupaten Purwakarta selain polusi dari cerobong industri.

Upaya untuk menangani persoalan Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan membutuhkan adanya keterpaduan dan koodinasi antar instansi melalui langkah-langkah koordinasi yang baik bahkan kalangan swasta dan masyarakat pun sangat dibutuhkan peran dan kesadarannya untuk mengantisipasi semakin kompleksnya permasalahan lingkungan hidup yang ada pada saat ini.

Jika melihat letaknya, Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30' – 107°40' Bujur Timur dan 6°25' – 6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang dan Kab. Subang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 Desa dan 9 Kelurahan, 476 Dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan 2.959 Rukun Tetangga (RT), seperti yang tergambar dalam Tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta**

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA /KELURAHAN
	KM <sup>2</sup>	%	
1	2	3	4
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	54,66	5,63	10
17. Bungursari	56,50	5,81	10
<b>JUMLAH</b>	<b>971,72</b>	<b>100,00</b>	<b>192</b>

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu :

a. Wilayah Pegunungan

Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah;

b. Wilayah Perbukitan

Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80 persen dari total luas wilayah;

c. Wilayah Dataran

Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

Gambaran umum demografis wilayah Kabupaten Purwakarta, tercermin dari jumlah penduduk Purwakarta, pada tahun 2020 berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 950.066 jiwa. Dikarenakan Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali (tahun berakhiran 0), maka untuk tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta menggunakan data proyeksi. Data penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2013 diprediksikan mencapai 898.300 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,94% (data proyeksi kinerja daerah RPJMD Tahun 2018-2023). Hal ini disebabkan selain akibat faktor pertumbuhan penduduk alami, juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar.

Dengan pengertian tersebut diatas, jelas bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tanggung jawab semua pihak, yang meliputi subjek pengelola, penata dan semua unsur serta komponen objek Pengelolaan dan Penataan Lingkungan Hidup.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan – peraturan yang melandasi disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

- dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program - programnya dan juga keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta selama periode 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 sehingga perencanaan tersebut dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup dengan mendeskripsikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya yang dimulai dari perencanaan hingga penganggaran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan yang direncanakan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dengan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Tahun 2023, mengacu pada APBD Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Berisikan kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para *stakeholders* yang terkait langsung dengan pelayanan.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup**

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, dan pada bagian ini akan diuraikan mengenai *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023, serta progress pencapaian kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program dan kegiatannya.

Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan juga merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**B. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 35.736.759.057,- dengan 10 Program , 18 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.

Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Purwakarta

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelembagaan Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
2.05.2.05.1.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi perkantoran	100%	18.902.422.216	19.800.316.290	18.902.422.216	95,46 %			
2.05.2.05.1.07.01	Penyediaan Jasa Surt Menyurat	Jumlah item jasa surt menyurat yang dibutuhkan	100%	858.000	3.000.000	858.000	28,60 %			
2.05.2.05.1.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	100%	141.742.481	180.000.000	141.742.481	78,75 %			
2.05.2.05.1.07.06	Penyediaan Jasa Peneliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	100%	119.572.400	200.000.000	119.572.400	59,79 %			
2.05.2.05.1.07.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang dibayarkan	100%	61.750.000	70.000.000	61.750.000	88,21 %			
2.05.2.05.1.07.11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah barang cetak dan peggandaan yang dibayarkan	100%	63.910.000	94.203.000	63.910.000	67,84 %			



2.05.2.05.1.07.12	Perediaan Kooproses Instansi Lain/Perusahaan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / perengkapan bangunan kantor	100%	18.920.000	22.000.000	18.920.000	75,68 %		
2.05.2.05.1.07.14	Perediaan Pemeliharaan Tamah Tamaga	Jumlah pemeliharaan rumah tangga yang dibayarkan	100%	49.518.500	50.000.000	49.518.500	99,04 %		
2.05.2.05.1.07.17	Perediaan Makanan dan Minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman yang dibayarkan	100%	11.100.000	25.000.000	11.100.000	44,40 %		
2.05.2.05.1.07.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dibayarkan	100%	55.411.200	65.000.000	55.411.200	85,25 %		
2.05.2.05.1.07.20	Perediaan Jasa Tenaga PTT	Jumlah jasa tenaga PTT yang dibayarkan	100%	2.017.320.000	2.600.240.000	2.017.320.000	97,54 %		
2.05.2.05.1.07.21	Festival Perwakaba Intenewa	Terpenbihnya kebutuhan penunjang akan penyelenggaraan pertingitan hari Auli Perwakaba	100%	-	-	-	-		
2.05.2.05.1.07.33	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dibayarkan	100%	199.700.000	200.000.000	199.700.000	99,85 %		
2.05.2.05.1.07.35	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perbaikan gedung kantor yang dibayarkan	100%	193.272.500	200.000.000	193.272.500	-		
2.05.2.05.1.07.40	Pemeliharaan rutin/bertala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / bertala gedung kantor yang dibayarkan	100%	149.383.000	150.000.000	149.383.000	-		
2.05.2.05.1.07.42	Pemeliharaan rutin/bertala Kendaran Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin / bertala kendaran dinas / operasional	100%	686.917.561	700.000.000	686.917.561	98,13 %		

*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta*

2.05.2.05.1.07.44	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dibayarkan	100%	26.820.000	55.000.000	26.820.000	48,76 %			
2.05.2.05.1.07.61	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perengkapan Petugas Retribusi Kebersihan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan petugas retribusi kebersihan yang digunakan	100%	72.520.000	75.000.000	72.520.000	-			
2.05.2.05.1.07.63	Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan suku cadang kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan	100%	487.718.600	500.000.000	487.718.600	97,54 %			
2.05.2.05.1.07.64	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala alat berat yang dibayarkan	100%	144.056.950	200.000.000	144.056.950	-			
2.05.2.05.1.07.68	Pengadaan Pakainan Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan yang dibayarkan	100%	199.258.800	200.000.000	199.258.800	99,63 %			
2.05.2.05.1.07.75	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang dibayarkan	100%	-	-	-	-			
2.05.2.05.1.07.78	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah yang dibayarkan dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	3.480.000	5.000.000	3.480.000	69,60 %			
2.05.2.05.1.07.79	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang dibayarkan	100%	8.067.500	10.000.000	8.067.500	80,68 %			
2.05.2.05.1.07.82	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun SKPD	Jumlah yang dibayarkan dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun SKPD	100%	3.710.000	5.000.000	3.710.000	74,20 %			

2.05.2.05.1.07.83	Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Laporan Asset dan Barang Milik SKPD	100%	-	5.000.000	-	100 %			
2.05.2.05.1.07.87	Penyedia Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)	Terlaksananya Penyedia Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)	100%	8.955.550.000	9.150.000.000	8.955.550.000	97,87 %			
2.05.2.05.1.07.88	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Jumlah Premi Pembayaran BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS	100%	694.397.774	705.311.200	694.397.774	98,45 %			
2.05.2.05.1.07.90	Pemeliharaan Gedung Kantor Persampahan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor persampahan	100%	179.620.000	180.000.000	179.620.000	99,79 %			
2.05.2.05.1.07.91	Rehabilitasi Toilet Bidang Persampahan	Meningkatkan kualitas pemeliharaan toilet bidang persampahan	100%	45.705.000	50.000.000	45.705.000	91,41 %			
2.05.2.05.1.07.92	Penyediaan BBM Kendaraan Dinas / Operasional	Meningkatnya kualitas ketersediaan BBM kendaraan dinas / operasional	100%	3.892.309.950	4.200.000.000	3.892.309.950	92,67 %			
2.05.2.05.1.07.93	Pengadaan Aplikasi IT (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten)	Terlaksananya pengadaan aplikasi IT (sistem informasi lingkungan hidup kabupaten purwakarta)	100%	414.562.000	414.562.000	414.562.000	100 %			
2.05.2.05.1.07.94	Penyusunan Pelaporan LPPD	Tersedianya dokumen LPPD DLH	100%	750.000	5.000.000	750.000	15 %			
2.05.2.05.1.07.96	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	4.320.000	10.000.000	4.320.000	45,20 %			
2.05.2.05.1.15	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah	100%	2.860.783.710	2.986.825.000	2.860.783.710	95,78 %			
2.05.2.05.1.15.16	Penyediaan Ekstra Feeding Bagi Petugas Lapangan	Meningkatnya efektivitas kinerja pegawai	100%	195.092.000	200.000.000	195.092.000	97,55 %			
2.05.2.05.1.15.18	Pengadaan Tempat Sampah Organik dan Non Organik	Jumlah tempat sampah organik dan Non Organik yang dibeli	100%	98.003.600	100.000.000	98.003.600	98 %			

2.05.2.05.1.15.22	Peningkatan Kinerja Persampahan	Jumlah pelaksanaan kinerja persampahan pada waktu tertentu	100%	48.545.000	50.000.000	48.545.000	97,09 %			
2.05.2.05.1.15.23	Pengadaan Bin Sampah	Jumlah bin sampah yang dibeli	100%	98.093.000	100.000.000	98.093.000	98,09 %			
2.05.2.05.1.15.30	Pengadaan Peralatan Teknis	Jumlah peralatan teknis yang diadakan	100%	173.925.000	175.000.000	173.925.000	99,39 %			
2.05.2.05.1.15.35	Pembuatan Kompos di TPA Ciklotok	Jumlah kompos di TPA Ciklotok yang dihasilkan	100%	766.750	5.000.000	766.750	15,33 %			
2.05.2.05.1.15.38	Pengadaan Gerobak Sampah	Jumlah gerobak sampah yang jadi	100%	71.922.800	75.000.000	71.922.800	95,9 %			
2.05.2.05.1.15.40	Rekondisi Mobil Pengangkut Sampah	Jumlah mobil pengangkut sampah yang direkondisi	100%	93.686.060	100.000.000	93.686.060	93,69 %			
2.05.2.05.1.15.42	Pengadaan Bak Kontainer Sampah	Jumlah bak kontainer sampah yang dibeli	100%	97.070.000	100.000.000	97.070.000	97,07			
2.05.2.05.1.15.43	Pengadaan Tanah Urugan (Landfill) di TPA	Jumlah tanah urugan (landfill) untuk TPA Ciklotok yang dibeli	100%	198.324.000	200.000.000	198.324.000	99,16 %			
2.05.2.05.1.15.47	Pengadaan Mobil Kebersihan	Jumlah mobil kebersihan yang diadakan	100%	497.840.000	500.000.000	497.840.000	99,57 %			
2.05.2.05.1.15.50	Pembuatan Pos Jaga Petugas Retribusi	Jumlah pos jaga petugas retribusi yang dibangun	100%	64.300.000	75.000.000	64.300.000	85,73 %			
2.05.2.05.1.15.51	Perbaikan Jalan TPA Ciklotok	Panjang jalan TPA Ciklotok yang diperbaiki	100%	96.910.000	100.000.000	96.910.000	96,91 %			
2.05.2.05.1.15.53	Managemen Persampahan	Tersutusnya dokumen kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta	100%	286.825.000	286.825.000	286.825.000	100 %			
2.05.2.05.1.15.57	Pembuatan Tempat Pencucian Kendaraan Pengangkut Sampah di Garasi Pool Angkutan Sampah	Luas tempat pencucian kendaraan pengangkut sampah yang dibangun	100%	45.928.000	50.000.000	45.928.000	91,86 %			
2.05.2.05.1.15.58	Pembuatan TPS	Jumlah TPS (Tempat Penampungan Sampah)	100%	97.668.000	100.000.000	97.668.000	97,67 %			
2.05.2.05.1.15.59	Pengadaan dan Pembuatan Jembatan Timbang di TPA Ciklotok	Terlaksananya pengadaan dan pembuatan jembatan timbang di TPA Ciklotok	100%	-	-	-	-			

2.05.2.05.1.15.60	Penyusunan Database dan Identifikasi Subjek dan Objek Retribusi Kebersihan / Persampahan Kabupaten Purwakarta	Jumlah dokumen penyusunan data base dan identifikasi subjek dan objek retribusi kebersihan / persampahan kabupaten purwakarta yang disusun	100%	49.203.000	50.000.000	49.203.000	98,41 %			
2.05.2.05.1.15.63	Pereliharaan Mobil Toilet	Jumlah mobil toilet yang dipelihara	100%	75.102.500	75.000.000	75.102.500	99,86 %			
2.05.2.05.1.15.65	Kompensasi TPA Cikoleok Desa Margasari	Jumlah pemberian kompensasi terhadap masyarakat sekitar TPA Cikoleok	100%	197.688.000	200.000.000	197.688.000	98,84 %			
2.05.2.05.1.15.66	Pengadaan Publikasi Layanan Persampahan		100%	97.625.000	100.000.000	97.625.000	97,62 %			
2.05.2.05.1.15.67	Pengerukan Kolam IPLT		100%	144.609.000	150.000.000	144.609.000	96,41 %			
2.05.2.05.1.15.68	Operasional Bank Sampah Induk Purwakarta		100%	34.250.000	95.000.000	34.250.000	36,05 %			
2.05.2.05.1.15.70	Perbaikan (Overhaul) Excavator PC 200		100%	97.407.000	100.000.000	97.407.000	97,41 %			
<b>2.05.2.05.1.16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Target Pembinaan</b>	<b>100%</b>	<b>110.621.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>110.621.000</b>	<b>72,78 %</b>			
2.05.2.05.1.16.17	Pembinaan dan Pemantauan Penerimaan AMDAL, UKL - UPL	Jumlah Target Pembinaan	100%	37.114.000	50.000.000	37.114.000	74,23 %			
2.05.2.05.1.16.20	Bintik Komisi AMDAL	Jumlah Dokumen Amdal	100%	-	25.000.000	-	0 %			
2.05.2.05.1.16.28	Penyusunan Dokumen SLHD / DKLH	Jumlah dokumen informasi kajian lingkungan hidup	100%	71.867.000	75.000.000	71.867.000	95,82 %			
2.05.2.05.1.16.29	Penyusunan Kajian Pemantauan Sumber - Sumber Mata Air di Kabupaten Purwakarta	Jumlah dokumen kajian pemantauan sumber-sumber mata air	100%	1.640.000	2.000.000	1.640.000	82 %			
<b>2.05.2.05.1.17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Sumber Daya Alam ( Mata Air yang terjaga dan terlindungi )</b>	<b>100%</b>	<b>67.886.550</b>	<b>100.000.000</b>	<b>67.886.550</b>	<b>67,89 %</b>			

2.05.2.05.1.17.10	Pengelolaan Kelestarian Hayati	Jumlah dokumen perencanaan (DED) untuk penghijauan Taman Kelestarian Hayati	100%	22.552.000	50.000.000	22.552.000	45,1 %			
2.05.2.05.1.17.20	Perlindungan Sumber Daya Air	Jumlah pelaksanaan penanaman pohon disekitar mata air	100%	45.334.550	50.000.000	45.334.550	90,67 %			
2.05.2.05.1.25	Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Perumahan Yang Dinilai Kinerjanya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	77.240.400	100.000.000	77.240.400	77,24 %			
2.05.2.05.1.25.01	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Jumlah pelaksanaan pelayanan pencegahan pencemaran air	100%	32.899.000	50.000.000	32.899.000	65,8 %			
2.05.2.05.1.25.02	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara	Jumlah pelaksanaan pelayanan pencegahan pencemaran udara	100%	44.341.400	50.000.000	44.341.400	88,68 %			
2.05.2.05.1.26	Program Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan Ke Perumahan yang ada di Kabupaten Purwakarta	100%	166.562.100	250.000.000	166.562.100	66,62 %			
2.05.2.05.1.26.07	Verifikasi Pengaduan Akibat Dugan Pencemaran Lingkungan	Jumlah dokumen pos pengaduan	100%	42.822.600	50.000.000	42.822.600	85,65 %			
2.05.2.05.1.26.08	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Lingkungan	Penerimaan pengaduan	100%	-	-	-	-			
2.05.2.05.1.26.09	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sosialisasi pembinaan sekolah berbudaya lingkungan dan sekolah Adiwiyata	100%	40.174.500	100.000.000	40.174.500	40,17 %			
2.05.2.05.1.26.10	Peningkatan Kinerja Penilaian Kota Sehat / Adipura Tingkat Kabupaten Purwakarta	Jumlah titik patok Adipura	100%	-	-	-	-			

2.05.2.05.1.26.11	Sosialisasi dan Edukasi Penegakan Hukum Lingkungan DAS Citarum	Aplikasi SIPP	100%	39.956.000	50.000.000	39.956.000	79,91 %			
2.05.2.05.1.26.12	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan tindak lanjut dari pengadilan dan pengawasan berupa teguran, sanksi administratif, paksaan pemerintah dan sanksi administratif teguran tertulis	100%	43.609.000	50.000.000	43.609.000	87,22 %			
2.05.2.05.1.27	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang Terakreditasi	100%	450.425.000	475.000.000	450.425.000	94,83 %			
2.05.2.05.1.27.01	Persediaan Bahan Kimia Laboratorium	Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium	100%	98.875.000	100.000.000	98.875.000	98,87 %			
2.05.2.05.1.27.03	Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium	Jumlah pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) laboratorium	100%	14.996.000	25.000.000	14.996.000	59,98 %			
2.05.2.05.1.27.05	Penunjang Akreditasi Laboratorium	Jumlah pelaksanaan uji profisiensi laboratorium, audit internal, kaji ulang manajemen dan persiapan reakreditasi laboratorium	100%	38.987.000	50.000.000	38.987.000	77,97 %			
2.05.2.05.1.27.07	Perawatan (Maintenance) dan Kalibrasi Alat Laboratorium	Jumlah pelaksanaan perawatan (maintenance) dan kalibrasi alat laboratorium	100%	48.530.000	50.000.000	48.530.000	97,06 %			
2.05.2.05.1.27.09	Pengadaan Peralatan Laboratorium	Jumlah pengadaan peralatan laboratorium	100%	24.037.000	25.000.000	24.037.000	96,15 %			
2.05.2.05.1.27.11	Peningkatan Kinerja Pembantu Tenaga Teknis Laboratorium	Jumlah pengadaan alat laboratorium	100%	225.000.000	225.000.000	225.000.000	100 %			
2.05.2.05.1.27.13	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan (DAK FISIK)	Jumlah pengadaan alat laboratorium	100%	-	-	-	-			

2.05.2.05.1.30	Program Pengelolaan Sedot Tinja	Titik Pantau	100%	114.042.500	130.000.000	114.042.500	87,72 %			
2.05.2.05.1.30.02	Pembuatan Sticker Layanan Sedot Tinja	Terlaksananya kegiatan pembuatan sticker layanan sedot tinja	100%	-	10.000.000	-	0 %			
2.05.2.05.1.30.07	Pengadaan Pompa Mesin Sedot Tinja	Jumlah pompa mesin sedot tinja yang dibeli	100%	66.742.500	70.000.000	66.742.500	95,35 %			
2.05.2.05.1.30.09	Pengadaan Bolt Flap	Jumlah Bolt Flap yang dibeli	100%	47.300.000	50.000.000	47.300.000	94,6 %			
2.05.2.05.1.37	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Tingkat Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	100%	43.620.000	100.000.000	43.620.000	43,62 %			
2.05.2.05.1.37.03	Pengembangan Kampung Iklim	Jumlah pelaksanaan pembinaan lokasi proklam dan tersosialisasinya kampung iklim	100%	43.620.000	100.000.000	43.620.000	43,62 %			
2.05.2.05.1.37.04	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah laporan inventarisasi gas rumah kaca di Kabupaten Purwakarta	100%	-	-	-	-			
2.05.2.05.1.38	Program Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Kegiatan Properda	100%	187.332.000	325.000.000	187.332.000	57,64 %			
2.05.2.05.1.38.01	Gerakan Peduli Pengendalian DAS Citarum ( Festival )	Jumlah pelaksanaan festival Gerakan Masyarakat Citarum Harum	100%	-	-	-	-			
2.05.2.05.1.38.03	Pelaksanaan PROPERDA	Jumlah pelaksanaan penilaian kinerja perusahaan peserta Properda	100%	141.845.000	150.000.000	141.845.000	94,56 %			
2.05.2.05.1.38.04	Verifikasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah dan Limbah B3	Jumlah pelaksanaan verifikasi teknis permohonan rekomendasi izin pembuangan air limbah dan izin penyimpanan sementara dan	100%	26.710.000	50.000.000	26.710.000	53,42 %			



		pengumpulan skala kabupaten								
2.05.2.05.1.38.05	Pemertanian Kualitas Air Permukiman Sungai Cilamaya	Jumlah pemertanian kualitas air sungai citirun dan cilamaya dan pemertanian kualitas udara ambien	100%	8.432.000	75.000.000	8.432.000	11,24 %			
2.05.2.05.1.38.08	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kewajiban pengelolaan lingkungan lingkungan	100%	10.345.000	50.000.000	10.345.000	20,69 %			
2.05.2.05.1.38.10	Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah dan Limbah B3	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pendataan pencemaran air, pendataan pencemaran udara dan pendataan pencemaran limbah B3	100%	-	-	-	-			
2.05.2.05.1.38.12	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Kabupaten Purwakarta	Jumlah dokumen rencana induk sistem pengelolaan limbah domestik(RSPALD) di Kabupaten Purwakarta	100%	-	-	-	-			
2.05.2.05.1.38.13	Penyusunan Kajian dan DED IPAL Industri Cilamaya	Jumlah dokumen kajian dan DED IPAL Industri di Cilamaya	100%	-	-	-	-			
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga (Peralatan Pencegahan Penyebaran Covid-19)	Jumlah peralatan pencegahan penyebaran Covid-19	100%	400.000.000		400.000.000	100 %			
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							<b>31.449.834.275</b>	<b>29.039.534.368</b>	<b>92,34 %</b>
2.11.01.2.01	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							35.000.000	14.366.380	41,05 %

2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15,000,000	6.836.380	45,58 %
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10,000,000	3.210.000	32,10 %
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	Terselenggaranya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000	4.320.000	43,20 %
2.11.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>12,752,317,919</b>	<b>12.188.794.329</b>	<b>95,58 %</b>
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						12,732,317,919	12.180.155.076	95,66 %
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5,000,000	1.176.000	23,52 %
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						5,000,000	1.996.950	39,94 %
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10,000,000	5.466.294	54,66 %
3.681.7502.11.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>5,000,000</b>	<b>3.681.750</b>	<b>73,64 %</b>
2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Terselenggaranya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5,000,000	3.681.750	73,64 %

2.11.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							254.292.782	194.857.500	76,63 %
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						199.292.782	194.857.500	97,77 %
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Lingkungan Hidup)	Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						55.000.000	0	0
2.11.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							4.412.938.411	4.343.075.539	98,42 %
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						60.000.000	45.891.262	76,49 %
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Tertindakannya Perlatan dan Perlengkapan Kantor						0	0	0
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga (Dinas Lingkungan Hidup)	Tertindakannya Penyediaan Perlatan Rumah Tangga						50.000.000	49.854.998	99,73 %
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor						4.188.218.411	4.172.601.310	99,63 %
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup)	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						50.000.000	31.731.480	63,46 %
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Lingkungan Hidup)	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu						24.720.000	8.850.000	35,80 %
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat						40.000.000	34.136.489	85,34 %

		Kondisi dan Kemajuan SKPD								
2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							11.923.089,361	11.768.793,825	98,71 %
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Lingkungan Hidup)	Terdapatnya Jasa Surat Menyurat						5.000,000	1.800.000	36,00 %
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup)	Terdapatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						234.995,653	216.883.000	92,29 %
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Terdapatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						11.683.063,708	11.550.110,705	98,80 %
2.11.01.2.09	<b>Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							2.067.225,802	525.965,045	25,44 %
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup)	Terdapatnya Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dibawa						1.621.327,474	131.295,045	8,10 %
2.11.01.2.09.09	Peneliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Terdapatnya Peneliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						198.308,328	195.910.000	98,75 %
198.760.2.11.01.2.09.10	Peneliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Terdapatnya Peneliharaan Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						247.500,000	198.760.000	80,31 %
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							200.000,000	199.100.000	99,55 %

2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							200.000.000	199.100.000	99,55 %
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentasi Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota						200.000.000	199.100.000	99,55 %
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>2.321.000.000</b>	<b>512.177.693</b>	<b>22,07 %</b>
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							2.321.000.000	512.177.693	22,07 %
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut						1.756.000.000	59.189.402	3,37 %
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim						40.000.000	39.062.940	97,66 %
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Acara						525.000.000	413.925.351	78,84 %
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KERATI)</b>							<b>10.000.000</b>	<b>7.792.089</b>	<b>77,92 %</b>
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							10.000.000	7.792.089	77,92 %

2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keseluruhan Hayati (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati						10,000,000	7.792.089	77,92 %
2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)</b>							<b>50,000,000</b>	<b>67.688.650</b>	<b>90,25 %</b>
2.11.05.2.01	<b>Penyimpanan Sementara Limbah BB</b>							<b>50,000,000</b>	<b>47.279.350</b>	<b>94,56 %</b>
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah BB (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah BB						50,000,000	47.279.350	94,56 %
2.11.05.2.02	<b>Pengumpulan Limbah BB dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>25,000,000</b>	<b>20.409.300</b>	<b>81,64 %</b>
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah BB dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah BB dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan						25,000,000	20.409.300	81,64 %
2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>							<b>140,000,000</b>	<b>115.131.325</b>	<b>82,24 %</b>
2.11.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh</b>							<b>140,000,000</b>	<b>115.131.325</b>	<b>82,24 %</b>

	<b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketertarikan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Ketertarikan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					40.000.000	39.985.000	99,96%
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penetapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penetapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH					100.000.000	75.146.325	75,15 %
2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>						<b>50.000.000</b>	<b>15.143.800</b>	<b>30,29 %</b>
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000	15.143.800	30,29 %
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup					50.000.000	15.143.800	30,29 %
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	Lokasi					0	0	0

2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						0	0	0
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	0	0
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH					0	0	0
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						0	0	0
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						0	0	0
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota					0	0	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						10,909,454,470	9.728.023.100	89,17 %
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						10,861,954,470	9.728.023.100	89,56 %
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaan Ulang dan Pemulihan Kembali (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaan Ulang dan Pemulihan Kembali					93,405.127	92.300.000	98,82 %
2.11.11.2.01.03	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Persentase Pengurangan Sampah dengan					10,472,099,495	9.362.333.950	89,40 %



	Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	melakukan Pemeliharaan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota							
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					245.850.000	223.684.150	90,98 %
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Pasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan					49.999.344	49.705.000	0
	Dana Abkasi Khusus (DAK)						4.220.000.000	4.220.000.000	74,63 %
	Bantuan Propinsi						5.800.000.000	5.800.000.000	100 %
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Di selenggarakan oleh Pihak Swasta						47.500.000	0	0
2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah					47.500.000	0	0

Pada pencapaian pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2022, semua Program dan Kegiatan belum teralisasi secara maksimal dalam laporan triwulan I. Diharapkan pelaksanaan program / kegiatan keberhasilan capaian kinerja fisik maupun keuangan mencapai 100 % sesuai dengan target rencana, dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018 - 2023, dikarenakan Rencana Kerja 2022 masih dalam tahun berjalan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola daerah Kabupaten/Kota yaitu salah satunya Urusan di Bidang Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, dimana salah satu isinya adalah pembentukan lembaga teknis yang mengurus pengelolaan lingkungan hidup di daerah yaitu berbentuk Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Purwakarta di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi kepada lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
- c. Perumusan bahan kebijakan Bupati di bidang lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang pencegahan lingkungan hidup;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang konservasi sumberdaya alam;
- g. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang informasi dan kemitraan lingkungan;
- h. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis administratif yang meliputi program, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;



- i. Pembinaan terhadap unit pelayanan teknis badan dalam lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) orang pegawai yang berstatus PNS dengan berlatar belakang pendidikan dan bidang yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3 Data Pegawai Tahun 2022  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta**

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	<b>Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :</b>	
	1. SD	28
	2. SMP	23
	3. SMA	47
	4. Sarjana Muda (D1 – D3)	-
	5. S 1 dan D 4	19
	6. S 2	11
	<b>Jumlah</b>	<b>128 Orang</b>
2	<b>Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :</b>	
	1. Golongan I	33
	2. Golongan II	62
	3. Golongan III	22
	4. Golongan IV	11
	<b>Jumlah</b>	<b>128 orang</b>
3	<b>Pegawai berdasarkan jabatan :</b>	
	1. Eselon II	1
	2. Eselon III	5
	3. Eselon IV	17
	4. Eselon V	-
	5. Staf	105
	<b>Jumlah</b>	<b>128 orang</b>
4	1. Pegawai Tenaga Tetap	51
	2. Pegawai Tenaga Harian Lepas	338
		-
	<b>Jumlah</b>	<b>389 orang</b>

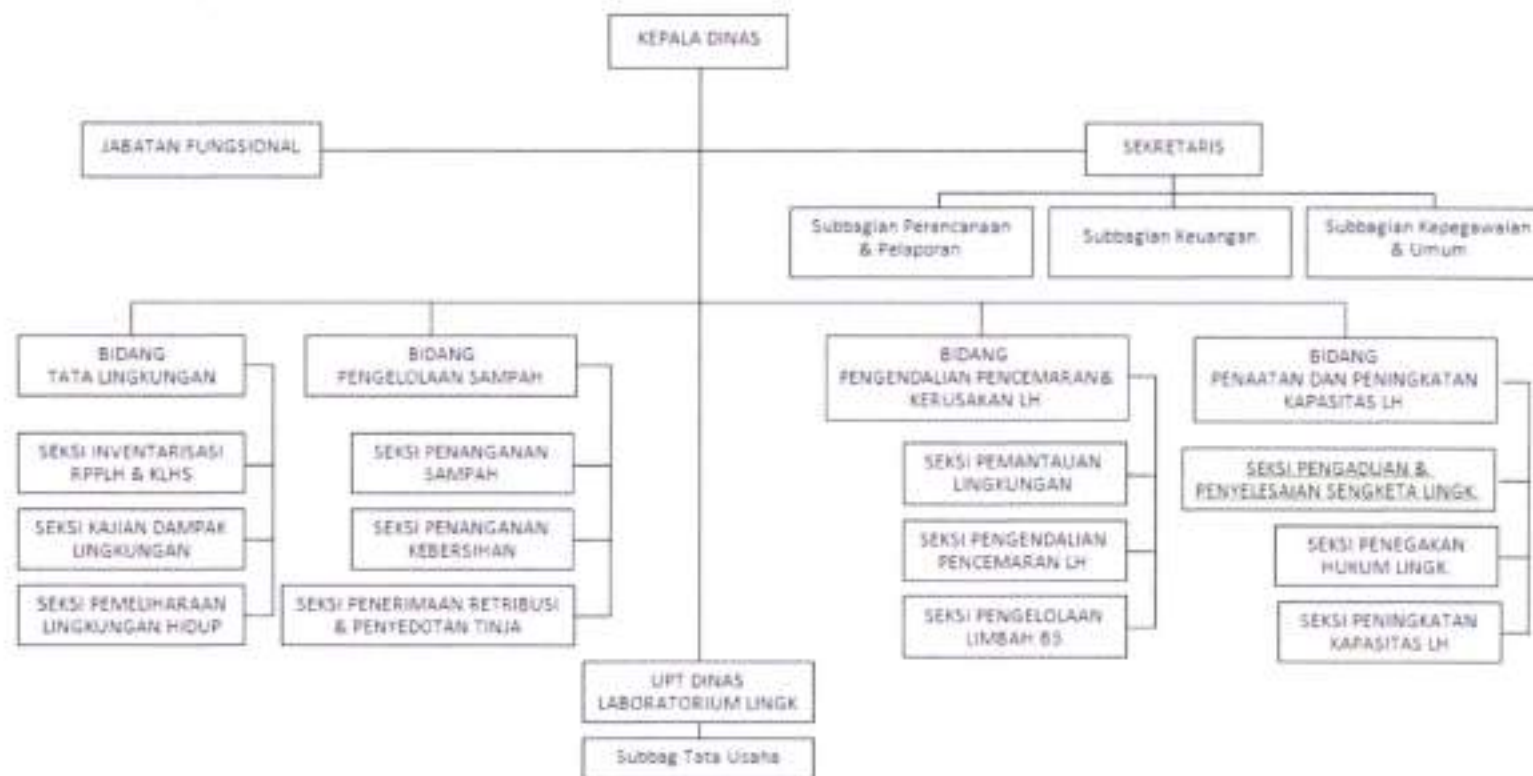
Sumber : Bagian Kepegawaian



Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat dan Susunan dan Peraturan Bupati 165 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - ❖ Sub Bagian Keuangan;
  - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
  - ❖ Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - ❖ Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
  - ❖ Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
  - ❖ Seksi Penanganan Sampah
  - ❖ Seksi Penanganan Kebersihan;
  - ❖ Seksi Penerimaan Retribusi dan Penyedotan Tinja.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
  - ❖ Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - ❖ Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - ❖ Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
6. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
  - ❖ Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
  - ❖ Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - ❖ Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. UPTD Laboratorium
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA**



Selain tugas pokok di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi pelayanan pada masyarakat yang didasari atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang kemudian di dukung dengan Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Walau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa urusan lingkungan hidup termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan atau hambatan dalam memberikan pelayanan dibidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat, karena pelayanan bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal demi terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pelayanan bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. Adapun fungsi pelayanan yang di maksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pencemaran Air;
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup.

TABEL T-C 30  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SPM Permen LH No.19 tahun 2008											
1	% jumlah usaha dan atau kegiatan yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	-	100%	100 titik	120 titik	120 titik	150 titik	89 titik	100 titik	120 titik	
	% jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	-	100%	20 titik	30 titik	30 titik	30 titik	20 titik	20 titik	30 titik	
	% luas lahan dan atau tanah untuk produksi bencasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	-	100%	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	-	2 lok/titik	2 lok/titik	
	% jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang di Tindaklanjuti	90%	-	90%	65%	80%	85%	90%	105,9%	85%	90%	



### **2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk tantangan kedepannya terhadap perkembangan Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Selain itu penentuan isu – isu penting / strategis harus didasarkan pada realitas dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang, dimana setiap perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia akan selalu berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Perubahan ini akan menjadi isu penting/strategis yang harus dicari solusinya. Beberapa faktor terkait hal tersebut adalah :

#### **a. Faktor Internal :**

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menjembatani antara Perusahaan dan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup sehingga apa yang diinginkan oleh berbagai pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan terencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

##### **2. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan maupun teknis lainnya.

##### **3. Sarana dan Prasarana**

Pemenuhan sarana dan prasarana terus dilakukan dalam upaya tuntutan tugas ke depannya dalam mendukung manajemen pengelolaan bidang lingkungan hidup yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

4. Anggaran

Peningkatan Anggaran Bidang Lingkungan Hidup yang tidak terlalu signifikan yang diberikan oleh APBD mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup.

**b. Faktor Eksternal :**

1. Globalisasi

Perkembangan Kemajuan Teknologi dan Industri di era globalisasi ini, menuntut Pemerintah Daerah mengikuti perkembangan teknologi agar aparatur dapat bersaing tinggi dan dituntut untuk memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sejajar. Pertumbuhan industri yang maju juga berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya, bisa mengakibatkan global warming yang mempengaruhi udara ambient. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta dituntut untuk siap menghadapi segala permasalahan lingkungan hidup pada era globalisasi ini.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Penegakan peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup harus benar – benar dilaksanakan agar adanya efek jera terhadap usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran baik udara, tanah mauun air. Disatu pihak Dinas Lingkungan Hidup harus sebagai Stakeholder di Bidang Lingkungan Hidup dituntut untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ini secara baik dan tegas.

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purwakarta, yang mana sampai dengan saat Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini disusun belum diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan review atas RKPD 2022.

Tabel T-C 31  
 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebetulan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebetulan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pemanjang Uraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				39,819,326,134	Program Pemanjang Uraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				32,251,822,994	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 TA	45,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 TA	12,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Purwakarta	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 TA	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Purwakarta	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 TA	10,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 TA	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 TA	12,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13,764,317,919	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13,039,017,919	

	Prosedur Ggf dan Tinjauan ASN	Purwokarta	Terdahannya Penbantuan Ggf dan Tinjauan ASN	1 TA	18.773.317.919	Prosedur Ggf dan Tinjauan ASN	Purwokarta	Terdahannya Penbantuan Ggf dan Tinjauan ASN	1 TA	18.012.247.919	
	Prosedur Administrasi Pelayanan Tuga ASN	Purwokarta	Terdahnya Administrasi Pelayanan Tuga ASN	1 TA	7.900.000	Prosedur Administrasi/ Pelayanan Tuga ASN	Purwokarta	Terdahnya Administrasi/ Pelayanan Tuga ASN	1 TA	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Absensi SKPD	Purwokarta	Terdahannya Koordinasi dan Pelaksanaan Absensi SKPD	1 TA	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Absensi SKPD	Purwokarta	Terdahannya Koordinasi dan Pelaksanaan Absensi SKPD	1 TA	12.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Abir Tahun SKPD	Purwokarta	Terdahannya Penyusunan Laporan Kegiatan Abir Tahun SKPD	1 TA	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Abir Tahun SKPD	Purwokarta	Terdahannya Penyusunan Laporan Kegiatan Abir Tahun SKPD	1 TA	13.000.000	
	Administrasi Berang MOR Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000	Administrasi Berang MOR Daerah pada Perangkat Daerah				4.998.239	
	Penyusunan Perencanaan Kebijakan Berang MOR Daerah SKPD	Purwokarta	Terdahnya Perencanaan Kebijakan Berang MOR Daerah SKPD	1 TA	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebijakan Berang MOR Daerah SKPD	Purwokarta	Terdahnya Perencanaan Kebijakan Berang MOR Daerah SKPD	1 TA	4.998.239	
	Administrasi Keperawatan Persekolah Daerah				248.000.000	Administrasi Keperawatan Persekolah Daerah				254.998.299	
	Pengadaan Pakaian Dinas Bersekolah/Kelompok Kelas/lingkungan	Purwokarta	Jumlah Pakaian Dinas Bersekolah/Kelompok Kelas/lingkungan	1 TA	250.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Bersekolah/Kelompok Kelas/lingkungan	Purwokarta	Jumlah Pakaian Dinas Bersekolah/Kelompok Kelas/lingkungan	1 TA	200.000.000	
	Pembelian dan Pelebaran Ruang Persekolahan Tugas dan Fungsi	Purwokarta	Terdahannya Pembelian dan Pelebaran Ruang Persekolahan Tugas dan Fungsi	1 TA	10.000.000	Pembelian dan Pelebaran Ruang Persekolahan Tugas dan Fungsi	Purwokarta	Terdahannya Pembelian dan Pelebaran Ruang Persekolahan Tugas dan Fungsi	1 TA	94.998.299	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

	Administrasi Urusan Perangka Daerah			4.750.000,218	Administrasi Urusan Perangka Daerah			4.075.000,200	
	Penyediaan komponen modal Lunak Perangkat Perangkat Keras	Persediaan	Terdanya komponen modal Lunak Perangkat Perangkat Keras	70.000,000	Penyediaan komponen modal Lunak Perangkat Perangkat Keras	Persediaan	Terdanya komponen modal Lunak Perangkat Perangkat Keras	29.000,000	
	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Keras	Persediaan	Terdanya Perlatan dan Perlengkapan Keras	303.000,215	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Keras	Persediaan	Terdanya Perlatan dan Perlengkapan Keras	178.000,300	
	Penyediaan Perlatan Keras Tangga	Persediaan	Terdanya Perlatan Perlatan Keras Tangga	75.000,000	Penyediaan Perlatan Keras Tangga	Persediaan	Terdanya Perlatan Perlatan Keras Tangga	49.500,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Keras	Persediaan	Terdanya Bahan Logistik Keras	4.000.000,000	Penyediaan Bahan Logistik Keras	Persediaan	Terdanya Bahan Logistik Keras	4.515.000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Perangkat	Persediaan	Terdanya Penyediaan Barang Cetak dan Perangkat	75.000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Perangkat	Persediaan	Terdanya Penyediaan Barang Cetak dan Perangkat	90.000,000	
	Fasilitas Kegiatan Tahun	Persediaan	Terdanya Fasilitas Kegiatan Tahun	40.000,000	Fasilitas Kegiatan Tahun	Persediaan	Terdanya Fasilitas Kegiatan Tahun	25.000,000	
	Pendukung Kerja Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persediaan	Pendukung Kerja Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000,000	Pendukung Kerja Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persediaan	Pendukung Kerja Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000,000	
	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			9.947.000,000	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			11.444.271,228	
	Penyediaan Jasa Sertifikasi	Persediaan	Terdanya Jasa Sertifikasi	7.000,000	Penyediaan Jasa Sertifikasi	Persediaan	Terdanya Jasa Sertifikasi	5.000,000	
	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sertifikasi, dan Lainnya	Persediaan	Terdanya Jasa Konsultasi, Sertifikasi, dan Lainnya	280.000,000	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sertifikasi, dan Lainnya	Persediaan	Terdanya Jasa Konsultasi, Sertifikasi, dan Lainnya	230.700,305	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Keras	Persediaan	Terdanya Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Keras	9.200.000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Keras	Persediaan	Terdanya Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Keras	11.787.571,800	

Dimas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

	Pembinaan Bering MIB Daerah Peninggal Cressa Peninggalan Daerah			1.250.000,000	Pembinaan Bering MIB Daerah Peninggal Cressa Peninggalan Daerah			1.250.000,000		
	Pendidikan Jasa Pembinaan, Bina Pembinaan dan Pukul Kemandirian Peninggalan Cressa atau Kemandirian Dinas Jabatan	Pendidikan	Terdalamnya Jasa Pembinaan, Bina Pembinaan dan Pukul Kemandirian Peninggalan Cressa atau Kemandirian Dinas Jabatan	1 TA	300.000,000	Pendidikan Jasa Pembinaan, Bina Pembinaan dan Pukul Kemandirian Peninggalan Cressa atau Kemandirian Dinas Jabatan	Pendidikan	Terdalamnya Jasa Pembinaan, Bina Pembinaan dan Pukul Kemandirian Peninggalan Cressa atau Kemandirian Dinas Jabatan	1 TA	100.000,000
	Pendidikan Jasa Pembinaan, Bina Pembinaan, Pukul dan Peninggalan Kemandirian Dinas Operasional atau Lapangan	Pendidikan	Terdalamnya Jasa Pembinaan, Bina Pembinaan, Pukul dan Peninggalan Kemandirian Dinas Operasional atau Lapangan	1 TA	900.000,000	Pendidikan Jasa Pembinaan, Bina Pembinaan, Pukul dan Peninggalan Kemandirian Dinas Operasional atau Lapangan	Pendidikan	Terdalamnya Jasa Pembinaan, Bina Pembinaan, Pukul dan Peninggalan Kemandirian Dinas Operasional atau Lapangan	1 TA	1.750.000,000
	Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembinaan	Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 TA	400.000,000	Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembinaan	Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 TA	-
	Pembinaan/Rehabilitasi Sempit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembinaan	Terdalamnya Pembinaan/Rehabilitasi Sempit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 TA	250.000,000	Pembinaan/Rehabilitasi Sempit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembinaan	Terdalamnya Pembinaan/Rehabilitasi Sempit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 TA	100.000,000
	Program Perencanaan Lapangan Hiblat		Program Perencanaan Lapangan Hiblat		500.000,000	Program Perencanaan Lapangan Hiblat				222.000,000
	Rencana Perencanaan dan Pengadaan Lapangan Hiblat (RPP/LH) Kabupaten / Kota		Rencana Perencanaan dan Pengadaan Lapangan Hiblat (RPP/LH) Kabupaten / Kota		500.000,000	Rencana Perencanaan dan Pengadaan Lapangan Hiblat (RPP/LH) Kabupaten / Kota				222.000,000

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Penyusunan dan Penetapan RPPH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan RPPH Kabupaten / Kota	1 TA	300.000,000	Penyusunan dan Penetapan RPPH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan RPPH Kabupaten / Kota	1 TA	100.000,000	
Pengendalian Pelaksanaan RPPH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pelaksanaan RPPH Kabupaten / Kota	1 TA	260.000,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pelaksanaan RPPH Kabupaten / Kota	1 TA	25.000,000	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				2.791.932,000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				475.000,000	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				2.791.932,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				475.000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Purwakarta	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	1 TA	200.000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Purwakarta	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	1 TA	25.000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Purwakarta	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	1 TA	150.000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Purwakarta	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	1 TA	50.000,000	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jenis	1 TA	2.441.932,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jenis	1 TA	400.000,000	
Program Pengelolaan Konektivitas Hayati (KEHATI)				100.000,000	Program Pengelolaan Konektivitas Hayati (KEHATI)				10.000,000	
Pengelolaan Konektivitas Hayati Kabupaten / Kota				100.000,000	Pengelolaan Konektivitas Hayati Kabupaten / Kota				10.000,000	



	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kebah	Purwakarta	Pemertasi Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kebah	1 TA	100,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kebah	Purwakarta	Pemertasi Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kebah	1 TA	10,000,000
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah BB)				450,000,000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah BB)				75,000,000
	Penyimpunan Sementara Limbah B3				100,000,000	Penyimpunan Sementara Limbah B3				50,000,000
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Purwakarta	Pemertasi Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 TA	100,000,000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Purwakarta	Pemertasi Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 TA	50,000,000
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta		1 TA	300,000,000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta		1 TA	25,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengendalian, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau	Purwakarta	Pemertasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengendalian, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau	1 TA	350,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengendalian, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau	Purwakarta	Pemertasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengendalian, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau	1 TA	25,000,000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Iain Lingkungan dan Iain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH)				400,000,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Iain Lingkungan dan Iain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH)				315,000,000



Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Irit Lingkungan dan Irit PPLH Diberitakan Oleh Pemda Kab/Kota				400,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Irit Lingkungan dan Irit PPLH Diberitakan Oleh Pemda Kab/Kota				315,000,000
Facilitasi Pemenuhan Ketertarikan dan Kewajiban Irit Lingkungan dan/atau	Purwakarta	Persentase Facilitasi Pemenuhan Ketertarikan dan Kewajiban Irit Lingkungan dan/atau	1 TA	125,000,000	Facilitasi Pemenuhan Ketertarikan dan Kewajiban Irit Lingkungan dan/atau	Purwakarta	Persentase Facilitasi Pemenuhan Ketertarikan dan Kewajiban Irit Lingkungan dan/atau	1 TA	175,000,000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Irit Lingkungan Hidup, Irit PPLH yang Diberitakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Persentase Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Irit Lingkungan Hidup, Irit PPLH yang Diberitakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	75,000,000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Irit Lingkungan Hidup, Irit PPLH yang Diberitakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Persentase Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Irit Lingkungan Hidup, Irit PPLH yang Diberitakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	40,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Purwakarta	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	1 TA	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Purwakarta	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	1 TA	100,000,000
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				850,000,000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				275,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				250,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				275,000,000

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Purwakarta	Persentase Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	1 TA	350,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Purwakarta	Persentase Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	1 TA	125,000,000	
Penyelenggaraan Persekolahan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Purwakarta	Lokal	1 TA	300,000,000	Penyelenggaraan Persekolahan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Purwakarta	Lokal	1 TA	150,000,000	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				150,000,000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				75,000,000	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				150,000,000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				75,000,000	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Unit Usaha/Donasi Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Purwakarta	Persentase Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Unit Usaha/Donasi Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	1 TA	150,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Unit Usaha/Donasi Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Purwakarta	Persentase Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Unit Usaha/Donasi Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	1 TA	75,000,000	
Program Pemangaran Pengabdian Lingkungan Hidup				75,000,000	Program Pemangaran Pengabdian Lingkungan Hidup				25,000,000	
Penyediaan Pengabdian Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				75,000,000	Penyediaan Pengabdian Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				25,000,000	
Pengelolaan Pengabdian Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pengelolaan Pengabdian Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	1 TA	75,000,000	Pengelolaan Pengabdian Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pengelolaan Pengabdian Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	1 TA	25,000,000	

	Program Pengabdian Masyarakat			4.877.843,516	Program Pengabdian Masyarakat			2.109.515,160		
	Pengabdian Masyarakat			4.802.843,516	Pengabdian Masyarakat			2.074.515,160		
	Pengabdian Masyarakat dengan melibatkan Perbukitan, Perbukitan Lintang dan Perbukitan Keribali	Perbukitan	Promosi Pengabdian Masyarakat dengan melibatkan Perbukitan, Perbukitan Lintang dan Perbukitan Keribali	1 TA	172.000,000	Perbukitan	1 TA	-		
	Pengabdian Masyarakat dengan melibatkan Perbukitan, Pengabdian Masyarakat, Pengabdian dan Perbukitan Abbi Sempak di TPA	Perbukitan	Promosi Pengabdian Masyarakat dengan melibatkan Perbukitan, Pengabdian, Pengabdian, Pengabdian dan Perbukitan Abbi Sempak di TPA	1 TA	1.325.000,000	Perbukitan	1 TA	200.000,000		
	Pengabdian Form Serta Masyarakat dalam Pengabdian Masyarakat	Perbukitan	Promosi Pengabdian Form Serta Masyarakat dalam Pengabdian Masyarakat	1 TA	400.000,000	Perbukitan	1 TA	345.000,000		
	Koordinasi dan Substansi Perbukitan Perbukitan dan Perbukitan Pengabdian Masyarakat	Perbukitan	Koordinasi dan Substansi Perbukitan Perbukitan dan Perbukitan Pengabdian Masyarakat	1 TA	6.302.843,516	Perbukitan	1 TA	1.318.915,160		
	Pembinaan dan Promosi Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Pembinaan dan Promosi Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta		75.900,000			25.000,000		
	Promosi dan Pelaksanaan Perbukitan Kerja Pengabdian Masyarakat	Perbukitan	Promosi dan Pelaksanaan Perbukitan Kerja Pengabdian Masyarakat	1 TA	75.000,000	Perbukitan	1 TA	30.000,000		
	<b>TOTAL</b>					<b>45.074.843,540</b>			<b>38.706.709,817</b>	

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan	Keterangan (Status)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kp Krajan RT 003 RW 002, Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta	Pemulihan Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup	50.000.000	belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	RW 01, Kecamatan Tegalaru, Kab. Purwakarta	Pemulihan Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup	100.000.000	perbaikan/pemulihan lingkungan hidup yang rusak	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kecamatan Campaka, Cibatu, Bangsari, dan Purwakarta, Kab. Purwakarta (Seluruh Kecamatan)	BK Pengembangan dan Peningkatan Bank Sampah	2.400.000.000	Kurangnya fasilitas bank sampah di Kabupaten Purwakarta guna mengurangi dampak pencemaran dan kerusakan daerah sungai citarum	Usulan disetujui

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dimana RKPD Kabupaten Purwakarta itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, terutama Pembangunan Jangka Menengah periode ke 5 Tahun 2018 -2023. Selain itu juga, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pula target RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dan prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan arah kebijakan dan Program Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 – 2023.

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005 – 2025 yang berkaitan dengan Tantangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional periode RPJM 2015 – 2019 adalah Memantapkan Pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan Pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang

berkualitas serta kemampuan IPTEK. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019, Visi Pembangunan 2015 – 2019 adalah **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Visi pembangunan diatas diurai menjadi 7 misi pembangunan dan diurai kembali menjadi 9 agenda prioritas atau yang disebut pula dengan **NAWACITA**.

Nawacita merupakan 9 agenda prioritas pembangunan nasional pemerintah periode 2015 – 2019, dimana ada 4 Nawacita yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu :

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Mewujudkan kemadiriian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik;
3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum;
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 akan memprioritaskan pembangunan (Sasaran Strategis Nasional) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicapai pada :

1. Peningkatan Produk hasil hutan dan pengembangan Jasa lingkungan :
  - a. Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu;
  - b. Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
2. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS :
  - a. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan;
  - b. Peningkatan Konservasi dn Keanekaragaman Hayati;
  - c. Peningkatan Pengelolaan DAS.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Perekonomian Kehati :
  - a. IKLH meningkat menjadi 66,5-68,6 di Tahun 2019;
  - b. Meningkatnya pemanfaatan Iptek dan SDM untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati sebesar 100 %.
4. Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan :
  - a. Menurunnya emisi GRK di 5 sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi dan industri dan limbah) sebesar mendekati 26 % di Tahun 2019;
  - b. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 daerah rentan yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN API.

Selain itu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, pembangunan Dinas Lingkungan Hidup ditempatkan pada misi ke 3 yaitu **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan**, dimana uraian dari misi ke 3 ini adalah bertujuan untuk :

Tujuan 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.

Tujuan 2. Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan.

Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Sasaran 2. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran 3. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.



Keterkaitan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan 9 langkah Mewujudkan Purwakarta Istimewa diuraikan sebagai berikut :

“ Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan terdapat pada Langkah Ke 3+5+6 Dalam “ 9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa.”

Pada Sasaran 2, salah satu kegiatan Tematik yang akan dilaksanakan adalah Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah dengan salah satu outputnya berupa terlaksananya penanganan pencemaran secara terpadu di DAS Citarum melalui **Gerakan Citarum Bestari**. Gerakan Citarum Bestari merupakan suatu gerakan dalam rangka mewujudkan pemulihan Sungai Citarum.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang professional di bidangnya;
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan;
3. Mengembalikan Kondisi Sumber Air, Sungai & Danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah dan lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

6. Penegakkan Hukum Lingkungan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2018– 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aparatur yang profesional & memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
3. Meningkatkan perlindungan konservasi sumber daya alam & keanekaragaman hayati;
4. Meningkatkan pengamanan sumber mata air;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
6. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan;
7. Meningkatnya pnaatan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

Namun demikian Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

**TABEL 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Manajemen Perkantoran Secara Optimal.	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100%
2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis alat uji yang telah memenuhi syarat akreditasi jenis sertifikat yang dimiliki aparat, sistem pengujian yang terbentuk	100%
3	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Lingkungan Hidup.	Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.	100%
4	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung.	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan.	Waktu penyelesaian perizinan lingkungan hidup	100%–
5	Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.	Prosentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan.	100%
6	Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan, terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan.	Meningkatnya persentase volume sampah yang ditangani.	100%

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam menentukan usulan program dan Rencana Kegiatan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup senantiasa mengacu kepada arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Purwakarta (RPJMD) dan Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2022. Visi Pembangunan Purwakarta untuk periode 2018 -2023 adalah “ **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**” dimana maksud dan penjelasan dari visi ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila. Pola pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara, dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia di muka bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang istimewa.

Penyusunan Rencana Kinerja 2022 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Rencana Kinerja yang diusulkan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan hasil Musrembang Kabupaten Purwakarta. Untuk Strategi Pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta mempunyai tema pokok pembangunan adalah “**MENYEMPURNAKAN TANGGA CINTA PURWAKARTA ISTIMEWA**”. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah.

Tabel T-C 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakira Maju Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.11.01	Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				32,251,823,894				57,909,224,255
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35,000,000				78,750,000
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	1 TA	12,500,000	APBD		1 TA	47,250,000
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	1 TA	10,000,000	APBD		1 TA	15,750,000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	1 TA	12,500,000	APBD		1 TA	15,750,000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13,039,617,919				28,871,467,629

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	1 TA	13,012,317,919	APBD		1 TA	28,837,867,629
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purwakarta	1 TA	-	APBD		1 TA	7,350,000
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwakarta	1 TA	12,300,000	APBD		1 TA	10,500,000
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	1 TA	15,000,000	APBD		1 TA	15,750,000
<b>2.11.01.2.03.01</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>4,998,250</b>				<b>10,500,000</b>
2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	1 TA	4,998,250	APBD		1 TA	10,500,000
<b>1.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>254,998,200</b>				<b>273,000,000</b>
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	1 TA	200,000,000	APBD		1 TA	262,500,000
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	1 TA	54,998,200	APBD		1 TA	10,500,000

<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>4,923,838,300</b>				<b>5,032,658,626</b>
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	1 TA	29,890,900	APBD		1 TA	73,500,000
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	1 TA	178,952,300	APBD		1 TA	412,658,626
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	1 TA	49,995,100	APBD		1 TA	78,750,000
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	1 TA	4,515,000,000	APBD		1 TA	4,305,000,000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Purwakarta	1 TA	30,000,000	APBD		1 TA	78,750,000
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Purwakarta	1 TA	25,000,000	APBD		1 TA	42,000,000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	1 TA	75,000,000	APBD		1 TA	42,000,000
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>12,043,371,225</b>				<b>20,650,350,000</b>
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	1 TA	5,000,000	APBD		1 TA	7,350,000
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	1 TA	250,799,345	APBD		1 TA	273,000,000

2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	1 TA	11,787,571,880	APBD		1 TA	20,370,000,000
<b>2.11.01.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,950,000,000</b>				<b>2,992,500,000</b>
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Purwakarta	1 TA	100,000,000	APBD		1 TA	315,000,000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	1 TA	1,750,000,000	APBD		1 TA	1,890,000,000
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purwakarta	1 TA	-	APBD		1 TA	420,000,000
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sempas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sempas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	1 TA	100,000,000	APBD		1 TA	367,500,000



2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				125,000,000				588,000,000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota				125,000,000				588,000,000
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	1 TA	100,000,000	APBD		1 TA	315,000,000
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	1 TA	25,000,000	APBD		1 TA	273,000,000
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				475,000,000				2,931,528,695
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				475,000,000				2,931,528,695
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Purwakarta	1 TA	25,000,000	APBD		1 TA	210,000,000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Purwakarta	1 TA	50,000,000	APBD		1 TA	157,500,000

	Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim							
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jenis	Purwakarta	1 TA	400,000,000	APBD		1 TA	2,564,028,695
<b>2.11.04</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>				<b>10,000,000</b>				<b>105,000,000</b>
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota</b>				<b>10,000,000</b>				<b>105,000,000</b>
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati	Purwakarta	1 TA	10,000,000	APBD		1 TA	105,000,000
<b>2.11.05</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>				<b>75,000,000</b>				<b>472,500,000</b>
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>				<b>50,000,000</b>				<b>105,000,000</b>
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemertahan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemertahan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Purwakarta	1 TA	50,000,000	APBD		1 TA	105,000,000

2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Purwakarta	1 TA	25,000,000			1 TA	367,500,000
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	Purwakarta	1 TA	25,000,000	APBD		1 TA	367,500,000
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH)				315,000,000				417,000,000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLIH Diberbitkan Oleh Penda Kab/Kota				315,000,000				417,000,000
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Purwakarta	1 TA	175,000,000	APBD		1 TA	131,250,000
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan	Persentase Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan	Purwakarta	1 TA	40,000,000	APBD		1 TA	75,750,000

	Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Purwakarta	1 TA	100,000,000	APBD		1 TA	210,000,000
<b>2.11.08</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>				<b>275,000,000</b>				<b>892,500,000</b>
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				275,000,000				892,500,000
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Purwakarta	1 TA	125,000,000	APBD		1 TA	367,500,000
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Lokasi	Purwakarta	1 TA	150,000,000	APBD		1 TA	525,000,000
<b>2.11.09</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>				<b>75,000,000</b>				<b>157,500,000</b>
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				75,000,000				157,500,000

2.11.09.2.01.01	Pendian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Persentase Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Purwakarta	1 TA	75,000,000	APBD		1 TA	157,500,000
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				25,000,000				78,750,000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				25,000,000				78,750,000
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	1 TA	25,000,000	APBD		1 TA	78,750,000
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan				2,109,935,163				9,321,693,692
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				2,074,935,163				9,242,943,692
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pemasukan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pemasukan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Purwakarta	1 TA	-	APBD		1 TA	183,750,000

2.11.11.2.01.03	Peningkatan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab.Kina	Persentase Peningkatan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA	Purwakarta	1 TA	200,000,000	APBD		1 TA	1,601,250,000
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Purwakarta	1 TA	355,000,000	APBD		1 TA	630,000,000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	Purwakarta	1 TA	1,519,935,163	APBD		1 TA	6,827,943,692
<b>2.11.11.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diabdikan oleh Pihak Swasta</b>				<b>35,000,000</b>				<b>78,750,000</b>
2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Purwakarta	1 TA	35,000,000	APBD		1 TA	78,750,000
<b>JUNLAH BELANJA OPERASIONAL</b>					<b>35,736,750,067</b>				<b>72,873,690,642</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun Rencana Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk tahun 2022 secara keseluruhan disajikan pada uraian berikut ini :

#### **Uraian Indikatif Program Rencana Kinerja DLH Tahun 2022**

Program yang ada di bidang Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

**Rencana Indikatif Kegiatan Tahun 2022**

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,**  
Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp. 35.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 12.500.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi	Rp. 10.000.000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.500.000
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp. 13.039.617.919
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 13.012.317.919
2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp. 12.300.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 15.000.000
	<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Rp. 4.998.250
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 4.998.250
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp. 254.998.200
	Sub Kegiatan :	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 200.000.000
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 54.998.200
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp. 4.923.838.300
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 29.890.900



2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 178.952.300
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 49.995.100
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 4.515.000.000
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 50.000.000
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 25.000.000
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 75.000.000
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp. 12.043.371.225
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 250.799.345
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 11.787.571.880
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</b>	Rp. 1.950.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 100.000.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.750.000.000
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 100.000.000

➤ **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Rp. 125.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000

➤ **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Rp. 475.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan thd Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp. 25.000.000
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 50.000.000
3.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 400.000.000

➤ **Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Rp. 10.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati	Rp. 10.000.000

➤ **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Rp. 50.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 50.000.000

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. 25.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau penimbunan	Rp. 25.000.000

➤ **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemda Kab/Kota</b>	Rp. 315.000.000
	Sub Kegiatan	
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 175.000.000
2.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.000.000
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Rp. 100.000.000

➤ **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah</b>	Rp. 275.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Rp. 125.000.000
2.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp. 150.000.000

➤ **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Daerah</b>	Rp. 75.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Rp. 75.000.000

➤ **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Rp. 25.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000

➤ **Program Pengelolaan Sampah**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Pengelolaan Sampah</b>	Rp. 2.074.935.163
	Sub Kegiatan :	
1.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 200.000.000
2.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 355.000.000
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.519.935.163
	Kegiatan : <b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	Rp. 35.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp. 35.000.000

## **BAB V** **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dina Lingkungan Hidup Periode 2018 – 2023, dimana Renstra dibuat sebagai upaya memberikan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, khususnya yang terkait dengan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan rencana kegiatan tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dan diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara terencana, sistematis, mengandung nilai, bobot dan mampu mendorong serta memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Rencana Kerja tahun 2022 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2022 dalam penyusunan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.



Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Setiap perencanaan tentu membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak karena masih banyak kekurangannya, terutama pada saat implementasi serta operasional dilapangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan mudah – mudahan dapat di akomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berikutnya. Kerjasama dan sinergitas adalah kunci utama dalam suksesnya suatu organisasi.





## **LAMPIRAN**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA**  
**TAHUN : 2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dibidangnya	Meningkatnya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH	Jumlah pejabat fungsional (PPLHD, PPNS, & Analis Kimia) & aparatur bersertifikat	15 Orang Pejabat Diklat PIN, 8 Orang Belum Mengikuti Diklat PIN	16 Orang Pejabat Diklat PIN, 7 Orang Belum Mengikuti Diklat PIN
2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi	6 Parameter matrik air permukaan, 5 parameter matrik air limbah	10 Parameter matrik air permukaan dan matrik air limbah
			Jenis sertifikat pengujian yang dimiliki aparat	2 Sertifikat	1 Sertifikat
			Sistem manajemen pengujian yang terbentuk (Jenis)	1 Jenis	1 Jenis
3	Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan damas sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari kebencanaan sistem nilai hayati	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keekaragaman hayati	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen
			Basis data lingkungan hidup yang operasional (perangkat lunak)	2 Perangkat	2 Perangkat
			Jumlah titik samur resapan (titik)	-	-
			Jumlah titik biopori (titik)	20 Titik	20 Titik
		Meningkatkan pengamanan sumber mata air	Prosentase mata air yang diamankan (titik)	5 Titik	5 Titik
4	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup	Sistem informasi perizinan lingkungan hidup (perangkat lunak yang operasional)	-	-
			SOP Perizinan lingkungan hidup	SOP Tata Cara Penilaian Amdal, Pemeriksaan Dokumen UKL - UPL an Persetujuan Lingkungan	SOP Tata Cara Penilaian Amdal, Pemeriksaan Dokumen UKL - UPL an Persetujuan Lingkungan
			Aparat bersertifikat amdal	7 Orang	7 Orang
			Jumlah sekolah yang dibina (Prog. Adiwiyata)	-	-



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
5.	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas air (titik)	6 Titik	6 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	3 Titik	3 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas tanah (titik)	-	-
6.	Penegakan hukum Lingkungan.	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen evaluasi dari pengaduan atau pengawasan Bersama sanksi administratif	11 Sanksi Administratif perusahaan di Kabupaten Purwakarta	11 Sanksi Administratif perusahaan di Kabupaten Purwakarta
7.	Verifikasi pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan pengaduan	Dokumen pengelolaan pengaduan	1 Dokumen	1 Dokumen
8.	Tersedianya Pakaian Lapangan Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH menggunakan seragam lapangan yang sama	Tersedianya Pakaian Lapangan Petugas Lapangan di Bidang Pengelolaan Sampah	450 Stel	450 Stel
9.	Terpeliharanya Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang secara rutin/berkala	Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang dapat beroperasi dengan baik	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up
10.	Terperuhnya kebutuhan ban dan aki Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang	Terperuhnya kebutuhan ban dan aki Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang	Terperuhnya kebutuhan ban 5 pes untuk roda 4, 7 pes untuk roda 6 dan 2 pes aki untuk roda 6 dan 1 pe untuk roda 4	Terperuhnya kebutuhan ban 5 pes untuk roda 4, 7 pes untuk roda 6 dan 2 pes aki untuk roda 6 dan 1 pe untuk roda 4	Terperuhnya kebutuhan ban 5 pes untuk roda 4, 7 pes untuk roda 6 dan 2 pes aki untuk roda 6 dan 1 pe untuk roda 4
11.	Tersedianya ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Terperuhnya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Terperuhnya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun	Terperuhnya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun	Terperuhnya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun
12.	Tersedianya peralatan teknis untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan	Terperuhnya peralatan teknis untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan	1 paket peralatan teknis	1 paket peralatan teknis	1 paket peralatan teknis



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
	Peyapuan DLH	Peyapuan DLH			
13.	Tersedianya Mesin Potong Rumput	Terpedainya Mesin Potong Rumput	9 unit	9 unit	9 unit
14.	Tersedianya 1 unit Kendaraan Angkutan Persampahan jenis compactor	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketaatan Perusahaan/Industri Terhadap Regulasi/Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 Perusahaan	25 Perusahaan
16.	Verifikasi Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Dan Limbah B3	Meningkatnya jumlah perusahaan industri yang memiliki izin dalam pengelolaan lingkungan	Dokumen Persetujuan Teknis	40 Perusahaan	40 Perusahaan
17.	Program Pemilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perusahaan Yang Taat Terhadap Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	20 Perusahaan
18.	Pemantauan Kualitas Air Permukaan Sungai Citarum	Terjantainya kualitas data pemantauan kualitas air sungai dan Kualitas Udara	Jumlah titik pantau kualitas air (titik)	6 Titik	6 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	3 Titik	3 Titik
19.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Sungai Citarum	Jumlah Sungai	-	2 Sungai